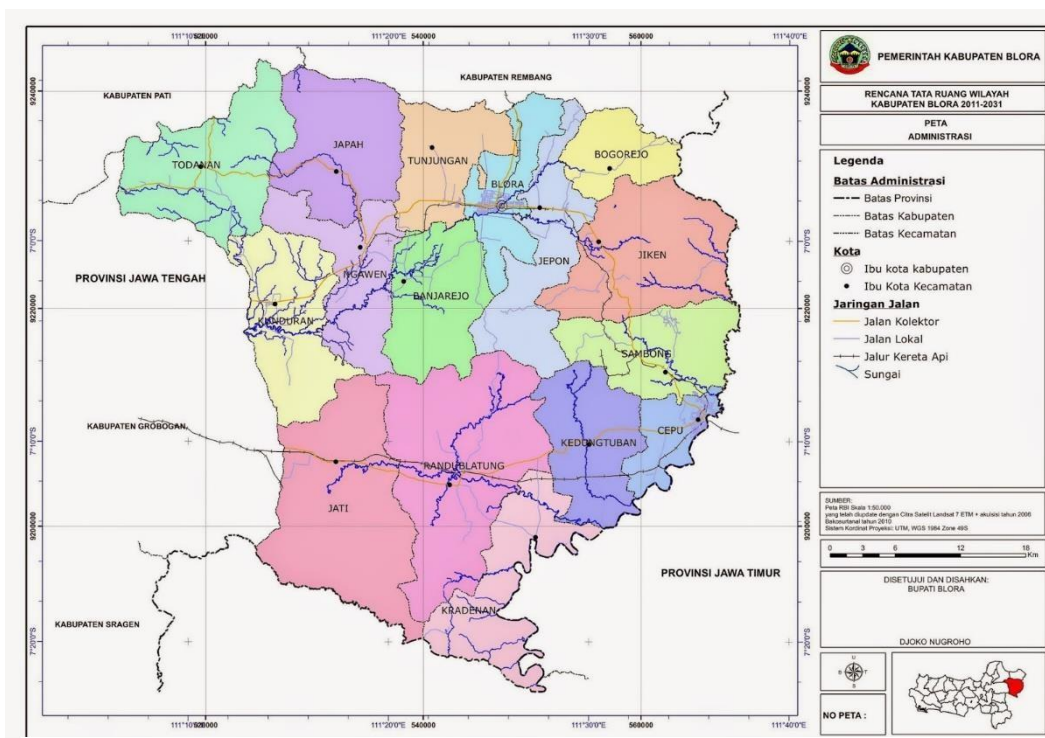


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Blora

Kabupaten Blora, yang dikenal dengan slogan "Blora Mustika," secara administratif terletak di ujung timur Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini memiliki luas 195.582,074 km² atau setara dengan 195.582,074 hektar, yang mencakup sekitar 5,59 persen dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Lokasi strategis ini menjadikan Kabupaten Blora sebagai daerah yang memiliki potensi pengembangan wilayah, baik dari segi geografis maupun sosial-ekonomi.



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Blora

Sumber : <https://blorakab.go.id>

Kabupaten Blora memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Barat : berbatasan dengan Kabupaten Grobogan,
2. Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang,
3. Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di Provinsi Jawa Timur,
4. Timur : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban yang juga berada di Provinsi Jawa Timur.

Batas-batas ini menunjukkan posisi strategis Kabupaten Blora sebagai daerah penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Blora secara astronomis terletak di antara 111°016' hingga 111°338' Bujur Timur serta 6°528' hingga 7°248' Lintang Selatan. Secara geografis, wilayah ini tidak memiliki garis pantai dan masih menjadi bagian dari kawasan utara Pulau Jawa. Blora termasuk dalam jajaran perbukitan kapur, yakni Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan, yang membentang sejajar dari barat ke timur. Selain itu, dua sungai utama yang mengalir melalui wilayah ini adalah Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, dalam blorakab.go.id).

2.1.2 Topografi

Wilayah Kabupaten Blora memiliki topografi yang beragam, terdiri dari dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 25 hingga 50 meter di atas permukaan laut (Mdpl). Kecamatan Cepu merupakan wilayah dengan ketinggian terendah, sedangkan Kecamatan Todanan

memiliki ketinggian tertinggi. Secara umum, bentuk topografi wilayah ini mencakup dataran, perbukitan, lembah, serta pegunungan dengan tingkat kemiringan yang bervariasi, mulai dari 0% hingga lebih dari 40%, yang mencerminkan kondisi dari datar hingga sangat curam, sebagai berikut:

1. Ketinggian lahan antara 0-40 Mdpl, meliputi Kecamatan Kradenan, Kedungtuban, dan Cepu. Ketinggian lahan 41-100 Mdpl, mencakup Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Cepu, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran, dan Todanan.
2. Ketinggian lahan lebih dari 100 Mdpl, berada di Kecamatan Jati, Randublatung, Kradenan, Kedungtuban, Sambong, Jiken, Jepon, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Ngawen, Kunduran, dan Todanan.

2.1.3 Iklim

Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh pergerakan angin muson.

1. Musim Hujan: Umumnya terjadi pada bulan November hingga April, dengan intensitas hujan tertinggi antara Desember hingga Februari. Pada periode ini, curah hujan cukup tinggi, sering kali disertai angin kencang serta badai petir.
2. Musim Kemarau: Berlangsung dari Mei hingga Oktober, ditandai dengan curah hujan yang sangat rendah.
3. Suhu udara cenderung lebih panas, dan kondisi kering dapat

menyebabkan penurunan ketersediaan air serta potensi kekeringan di beberapa daerah. Suhu Udara: Rata-rata suhu harian di Blora berkisar antara 22°C hingga 32°C, tetapi pada puncak musim kemarau, suhu siang hari bisa melebihi 33°C.

4. Kelembapan Udara: Sepanjang tahun, kelembapan udara di Blora relatif tinggi, terutama saat musim hujan, yang bisa mencapai sekitar 80-90%.
5. Pengaruh Angin Muson: Pada musim hujan, angin muson barat membawa udara lembab dari Samudra Hindia, menyebabkan peningkatan curah hujan. Sebaliknya, angin muson timur membawa udara kering dari Australia, sehingga wilayah ini mengalami musim kemarau.

Dengan kondisi iklim tropis seperti ini, sektor pertanian di Blora berkembang dengan baik. Tanaman seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan banyak dibudidayakan, terutama saat musim hujan karena ketersediaan air yang lebih optimal (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, dalam blorakab.go.id).

2.1.4 Kondisi Demografis Kabupaten Blora

Pada tahun 2023, ada sebanyak 901.621 jiwa penduduk di Kabupaten Blora. Jumlah ini bertambah sebanyak 13.397 jiwa penduduk dibandingkan data pada tahun 2022. Beberapa indikator kependudukan yang lain ada Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, dan lain lain. Pada Tahun 2023 di Kabupaten Blora, untuk indikator kepadatan penduduk adalah sebesar 506,14 penduduk per kilometer persegi. Untuk Rasio jenis kelamin sebesar 100,38, dan Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,10

persen (BPS Blora, 2024). Berikut adalah besaran dari jumlah penduduk tahun 2022 dan 2023 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blora :

Tabel 2. 1 Kondisi demografis Kabupaten Blora tahun 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)	
	2022	2023
Jati	49507	50398
Randublatung	77687	78813
Kradenan	41163	41800
Kedungtuban	57578	58465
Cepu	76530	77702
Sambong	27970	28527
Jiken	38415	38701
Bogorejo	24834	25202
Jepon	63040	64049
Blora	94175	94762
Banjarejo	62661	63813
Tunjungan	48185	48975
Japah	35392	35937
Ngawen	60948	62015
Kunduran	66443	67519
Todanan	63696	64943
Kabupaten Blora	888224	901621

Sumber : BPS Kab. Blora (2024)

Berdasarkan data demografis mengenai jumlah penduduk di 16 kecamatan di Kabupaten Blora pada tahun 2022–2023, terlihat bahwa seluruh kecamatan mengalami peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat memberikan dampak positif maupun tantangan bagi pemerintah daerah. Dari sisi positif, pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan potensi tenaga kerja, memperluas pasar ekonomi lokal, serta mendorong perkembangan sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, di sisi lain, bertambahnya jumlah penduduk juga memerlukan kesiapan dalam penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja, agar tidak menimbulkan masalah sosial, seperti kepadatan penduduk atau kurangnya fasilitas publik.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai status pekerjaan utama penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Blora pada tahun 2023. Data ini diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Status pekerjaan yang dicakup dalam tabel meliputi beberapa kategori, antara lain bekerja secara mandiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau anggota keluarga, berusaha dengan dukungan buruh tetap yang menerima upah, bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, serta pekerja lepas di sektor pertanian dan non-pertanian. Selain itu, data juga mencakup kelompok pekerja keluarga yang tidak menerima upah.

Tabel 2. 2 Jumlah usia 15 tahun keatas menurut status pekerjaan utama

Status Pekerjaan Utama	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	2023	2023	2023
Berusaha sendiri	50149	40523	90672
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	93759	46418	140177
Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	9849	3145	12994
Buruh/karyawan/pegawai	85003	47969	132972
Pekerja bebas di pertanian	-	-	-
Pekerja bebas di non pertanian	-	-	-
Pekerja keluarga/tidak dibayar	27634	92246	119880
Jumlah	-	-	-

Sumber : BPS Kab. Blora (2024)

Berdasarkan data status pekerjaan utama penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Blora tahun 2023, dapat terlihat bagaimana distribusi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel tersebut, ada beberapa hal penting yang bisa dianalisis:

- 1) Dominasi Laki-laki dalam Kategori Berusaha Sendiri dan Berusaha Dibantu Pekerja Jumlah laki-laki yang berusaha sendiri lebih tinggi

dibandingkan perempuan, yaitu

- 2) 50.149 jiwa dibandingkan dengan 40.523 jiwa. Hal serupa juga terlihat pada kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, di mana laki-laki mencapai 93.759 jiwa, sedangkan perempuan hanya 46.418 jiwa. Ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih banyak terlibat dalam usaha mandiri dan usaha kecil yang melibatkan pekerja tidak tetap. Hal ini bisa disebabkan oleh peran gender di masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan domestik atau informal.
- 3) Kesenjangan pada Kategori Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar Pada kategori usaha yang dibantu oleh buruh tetap dan dibayar, jumlah laki-laki (9.849 jiwa) jauh lebih besar dibandingkan perempuan (3.145 jiwa). Menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dalam usaha yang memiliki skala lebih besar dan mampu mempekerjakan karyawan tetap dengan gaji. Sementara itu, perempuan cenderung lebih terlibat dalam usaha kecil atau informal yang belum memiliki struktur ketenagakerjaan yang kuat.
- 4) Jumlah Buruh/Karyawan/Pegawai dalam kategori pekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, jumlah laki-laki (85.003 jiwa) dan perempuan (47.969 jiwa) cukup signifikan, meskipun masih ada selisih yang cukup besar. Perempuan juga memiliki peran yang cukup besar dalam sektor formal, meskipun jumlahnya masih lebih

rendah dibandingkan laki-laki.

2.2 Perekonomian Di Kabupaten Blora

Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Blora tahun 2023 sebesar 3,10%. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga sebesar 67,43% ternyata masi merajai presentase PDRB Kabupaten Blora menurut pengeluaran. Disusul pembentukan modal tetap bruto dan net ekspor barang dan jasa diurutan kedua dan ketiga. Sementara kontributor PDRB menurut lapangan usaha di kabupaten Blora masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian peringkat pertama sebesar 23,47%, disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan peringkat kedua dan peringkat ketiga sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15,39%. (BPS Kabupaten Blora, 2024)

2.2.1 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora sebanyak 99,83 ribu jiwa pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99,61 ribu jiwa pada tahun 2023 dengan garis kemiskinan sebesar 425.135 rupiah. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS Kabupaten Blora, 2024). Berikut adalah Garis Kemiskinan Jumlah dan Persentase

Penduduk Miskin di Kabupaten Blora 2013–2023 :

Tabel 2. 3 Garis Kemiskinan dan Jumlah Persentase Jumlah Penduduk Miskin

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	237.850	123,80	14,64
2014	248.903	116,00	13,66
2015	257.581	115,00	13,52
2016	279.972	113,90	13,33
2017	291.114	111,90	13,04
2018	308.520	102,50	11,90
2019	335.837	97,86	11,32
2020	353.259	103,73	11,96
2021	363.649	107,05	12,39
2022	390.478	99,83	11,53
2023	425.135	99,61	11,49

Sumber : Blora Dalam Angka 2023.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tren yang dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Garis Kemiskinan Garis kemiskinan di Kabupaten Blora mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, garis kemiskinan sebesar Rp237.850 per kapita per bulan, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp425.135 per kapita per bulan.
Analisis: Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan bahwa standar minimum kebutuhan dasar masyarakat terus meningkat, kemungkinan dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan harga bahan pokok, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, untuk memenuhi

kebutuhan dasar, masyarakat memerlukan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

- 2) Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Secara umum, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 123,8 ribu jiwa (14,64%) pada tahun 2013 menjadi 99,61 ribu jiwa (11,49%) pada tahun 2023. Analisis: Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Blora dalam jangka panjang.
- 3) Program-program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan kemungkinan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, ada beberapa fluktuasi dalam data, terutama pada tahun 2020 dan 2021, di mana jumlah penduduk miskin sempat meningkat menjadi 103,73 ribu jiwa (11,96%) pada 2020 dan 107,05 ribu jiwa (12,39%) pada 2021 sebelum kembali menurun pada 2022 dan 2023. Analisis: Lonjakan ini kemungkinan besar terjadi akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, dan sektor ekonomi melemah. Setelah pandemi mereda, jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang cukup baik.
- 4) Tren Positif dalam Pengentasan Kemiskinan Jika dibandingkan dari tahun 2013 hingga 2023, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Dari 14,64%

di tahun 2013 menjadi 11,49% di tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Analisis: Penurunan ini mengindikasikan bahwa strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan mulai menunjukkan hasil yang positif. Namun, meskipun terjadi penurunan, jumlah penduduk miskin yang masih berada di angka 99,61 ribu jiwa tetap menjadi perhatian utama, terutama dalam memastikan mereka benar-benar keluar dari garis kemiskinan secara berkelanjutan.

2.3 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Blora



Dinas Pendidikan Kabupaten Blora adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Blora. Sebagai instansi yang memiliki peran strategis, dinas ini mengemban tugas untuk memastikan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta mengacu

pada standar pendidikan nasional, termasuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. Dengan komitmen yang tinggi, dinas ini terus berupaya memberikan layanan pendidikan yang memadai, baik dalam aspek kurikulum, kualitas tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana belajar.

Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Blora selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12, yang menetapkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP). Sementara itu, pendidikan menengah (SMA dan SMK) serta pendidikan khusus berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora bertanggung jawab dalam pengelolaan serta peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini, sesuai dengan kebijakan dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam struktur kelembagaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah, pemerintah desa, masyarakat, serta organisasi profesi guru, untuk menciptakan sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, dinas ini juga mengelola berbagai program bantuan pendidikan, seperti beasiswa dan subsidi pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan

Kabupaten Blora adalah kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, dinas ini terus berinovasi untuk mengatasi hambatan tersebut melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

2.3.1 Visi, Misi, dan Motto Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Dinas Pendidikan Kabupaten Blora memiliki visi, misi, dan motto layanan sebagai berikut :

Visi : “ Sesarengan Bangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing ”

1. Sesarengan Mbangun Blora : Pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama – sama dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas.
2. yang dimiliki dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder termasuk swasta.
3. Unggul : Kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal yang dimiliki.
4. Berdaya Saing : Dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora.

Misi : “Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter”

Membangun sumberdaya manusia berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sasaran dari misi ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan :
 - a. Rata-rata lama sekolah (laki dan perempuan)
 - b. Angka harapan lama sekolah (laki dan perempuan)
2. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat :
 - a. Usia Harapan Hidup Laki-Laki
 - b. Usia Harapan Hidup Perempuan
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan :
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender

Motto Layanan : Dinas Pendidikan Kabupaten Blora MIRASA Melayani dengan RASA (Responsif, Akurat, Santun, dan Amanah)

2.3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Struktur ini mencakup berbagai bidang, seksi, dan unit kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Melalui pembagian tugas yang jelas, dinas ini berupaya menciptakan koordinasi yang efektif dan efisien dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan di Kabupaten Blora. Dinas Pendidikan Kabupaten Blora memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan kepegawaian

3. Bidang pembinaan pendidikan dasar membawahi seksi pembinaan sekolah dasar, seksi pembinaan sekolah menengah pertama
4. Bidang sarana dan prasarana membawahi seksi sarana prasarana dan aset sekolah dasar dan seksi sarana prasarana dan aset sekolah menengah pertama
5. Bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat membawahi seksi pendidikan anak usia dini dan seksi pendidikan masyarakat
6. Bidang guru dan tenaga kependidikan membawahi seksi administrasi mutasi guru dan tenaga kependidikan serta seksi disiplin dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan

Penulisan ini berfokus pada implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, khususnya bagi peserta didik kurang mampu di Kabupaten Blora pada tahun 2023. Dalam hal ini, Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora memiliki peran yang sangat relevan dengan penulisan ini karena bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan dasar, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, penyusunan kurikulum, serta pembinaan sekolah dasar dan menengah pertama. Selain itu, Bidang Pendidikan Dasar juga memiliki tugas dalam memastikan bahwa pendidikan dasar berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pemerataan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Dengan tugas dan fungsi seperti pendataan kelembagaan, pengelolaan pendidikan dasar,

serta evaluasi dan penyusunan laporan, bidang ini memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi SPM.

Melalui berbagai program dan kebijakan yang dijalankan, Bidang Pendidikan Dasar berupaya memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa terkecuali, dapat memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dalam konteks peserta didik kurang mampu, peran bidang ini mencakup pemberian bantuan pendidikan, koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendukung aksesibilitas pendidikan, serta pengawasan terhadap efektivitas program yang telah diterapkan. Oleh karena itu, penulisan ini tidak hanya menyoroti bagaimana kebijakan SPM diterapkan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan Dasar dalam mengatasi kendala yang dihadapi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan.

2.4 Satuan Pendidikan Di Kabupaten Blora

Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Blora mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi masyarakat. Data terkait jumlah sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah memberikan gambaran mengenai sebaran fasilitas pendidikan di wilayah ini. Informasi ini penting untuk memahami kondisi terkini sektor pendidikan di Kabupaten Blora serta mendukung analisis lebih lanjut terkait pemerataan layanan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.4.1 Jumlah satuan pendidikan Sekolah dasar di Kabupaten Blora

Jumlah satuan pendidikan pada tingkat SD mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan dasar yang merata di seluruh wilayah di Kabupaten Blora. Data berikut digunakan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pendidikan dasar yang dapat menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, serta untuk mengidentifikasi tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan. Berikut adalah tabel jumlah sekolah dasar (SD) di 16 kecamatan dari tahun 2022 – 2023 :

Tabel 2. 4 Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Blora 2022-2023

Kecamatan	Jumlah Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Kecamatan dan Jenjang					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Jati	34	34	-	-	34	34
Randublatung	52	52	1	1	53	53
Kradenan	29	29	1	1	30	30
Kedungtuban	35	35	2	2	37	37
Cepu	33	33	5	5	38	38
Sambong	23	23	-	-	23	23
Jiken	29	29	-	-	29	29
Bogorejo	22	22	-	-	22	22
Jepon	43	43	-	-	43	43
Blora	52	52	8	9	60	61
Banjarejo	37	37	-	-	37	37
Tunjungan	32	32	4	4	36	36
Japah	24	24	-	-	24	24
Ngawen	38	38	-	-	38	38
Kunduran	42	42	-	-	42	42
Todanan	45	45	-	-	45	45
Kabupaten Blora	570	570	21	22	591	592

Sumber : BPS Kab Blora 2024.

Berdasarkan tabel jumlah satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Blora tahun 2022–2023, dapat dianalisis beberapa hal penting terkait kondisi pendidikan dasar di wilayah ini:

- 1) Jumlah SD di Kabupaten Blora tidak mengalami perubahan signifikan antara tahun 2022 dan 2023. Total SD hanya bertambah satu sekolah, dari 591 menjadi
- 2) 592. Peningkatan ini berasal dari bertambahnya satu sekolah swasta di Kecamatan Blora (dari 8 menjadi 9), sementara jumlah SD negeri tetap sama di seluruh kecamatan.
- 3) Dari total 592 SD pada tahun 2023, sebanyak 570 (96,28%) merupakan sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta hanya berjumlah 22 (3,72%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik mengandalkan sekolah negeri untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar.
- 4) Sementara kecamatan dengan jumlah SD paling sedikit adalah Bogorejo dan Sambong (masing-masing hanya memiliki 22 dan 23 sekolah). Meskipun jumlah penduduk dan luas wilayah bisa mempengaruhi perbedaan ini, pemerataan akses pendidikan dasar tetap menjadi perhatian penting agar semua anak usia sekolah memiliki kesempatan belajar yang setara.
- 5) Minimnya Perkembangan Sekolah Swasta Data menunjukkan bahwa sekolah swasta di Kabupaten Blora sangat terbatas, dengan hanya 22 sekolah swasta dari total 592 SD. Selain itu, dari tahun 2022 ke 2023, hanya ada satu tambahan sekolah swasta, yaitu di Kecamatan Blora. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sekolah swasta masih belum optimal dan sebagian

besar tanggung jawab pendidikan dasar masih berada di tangan pemerintah.

2.4.2 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Blora

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan jenjang pendidikan lanjutan yang berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi anak-anak usia sekolah menengah di Kabupaten Blora. Jumlah satuan pendidikan SMP di wilayah ini menjadi indikator penting dalam mengukur pemerataan dan kapasitas layanan pendidikan tingkat menengah. Data ini tidak hanya memberikan gambaran ketersediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan untuk meningkatkan mutu dan daya jangkau pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Blora. Jumlah sekolah menengah pertama (SMP) Kabupaten Blora di tiap kecamatan tahun 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Blora

Kecamatan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Jati	4	4	2	2	6	6
Randublatung	5	5	3	4	8	9
Kradenan	3	3	3	3	6	6
Kedungtuban	2	2	7	8	9	10
Cepu	5	5	8	8	13	13
Sambong	2	2	-	-	2	2
Jiken	4	4	1	1	5	5
Bogorejo	3	3	1	1	4	4
Jepon	4	4	1	1	5	5
Blora	7	7	6	6	13	13
Banjarejo	2	2	-	-	2	2

Kecamatan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
	Negeri		Swasta		Total	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Tunjungan	3	3	4	4	7	7
Japah	2	2	1	1	3	3
Ngawen	4	4	3	3	7	7
Kunduran	3	3	2	2	5	5
Todanan	3	3	2	2	5	5
Kabupaten Blora	56	56	44	46	100	102

Sumber : BPS Kab. Blora (2024)

Berdasarkan tabel jumlah satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Blora tahun 2022–2023, dapat dilakukan beberapa analisis penting terkait kondisi pendidikan menengah pertama di wilayah ini:

- 1) Peningkatan Jumlah Sekolah Secara keseluruhan, jumlah SMP di Kabupaten Blora mengalami sedikit peningkatan, dari 100 sekolah pada tahun 2022 menjadi 102 sekolah pada tahun 2023. Peningkatan ini berasal dari bertambahnya dua sekolah swasta, yaitu di Kecamatan Randublatung (dari 3 menjadi 4) dan Kedungtuban (dari 7 menjadi 8). Namun, jumlah SMP negeri tetap stagnan di angka 56 sekolah.
- 2) Dominasi Sekolah Negeri yang Lebih Rendah Dibanding SD Jika dibandingkan dengan tingkat sekolah dasar (SD), persentase sekolah negeri di tingkat SMP lebih rendah. Dari total 102 SMP di tahun 2023, hanya 56 (54,9%) yang merupakan sekolah negeri, sementara 46 (45,1%) adalah sekolah swasta. Ini menunjukkan bahwa peran sekolah swasta dalam pendidikan menengah pertama lebih besar dibandingkan di tingkat SD, meskipun masih lebih sedikit daripada sekolah negeri.
- 3) Sebaran SMP yang Tidak Merata Beberapa kecamatan memiliki jumlah

SMP yang cukup banyak, seperti Blora dan Cepu (masing-masing 13 sekolah), sementara beberapa kecamatan lainnya hanya memiliki dua atau tiga SMP, seperti Banjarejo (2 sekolah), Sambong (2 sekolah), dan Japah (3 sekolah). Ketimpangan ini berpotensi memengaruhi akses pendidikan bagi siswa di daerah dengan jumlah sekolah lebih sedikit, terutama jika jarak antara sekolah cukup jauh.

- 4) Minimnya Penambahan SMP Negeri Meskipun ada penambahan dua sekolah swasta, jumlah SMP negeri di Kabupaten Blora tidak mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melakukan ekspansi signifikan dalam pembangunan sekolah negeri di tingkat menengah pertama. Padahal, penambahan sekolah negeri dapat membantu memperluas akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2.4.3 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Blora 2023.

Kecamatan	Jumlah Sekolah SMA (Negeri)	Jumlah Sekolah SMA (Swasta)	Jumlah Sekolah SMA (Negeri+Swasta)
Jati	-	1	1
Randublating	1	3	4
Kradenan	-	1	1
Kedungtuban	-	1	1
Cepu	2	5	7
Sambong	-	-	-
Jiken	-	-	-
Bogorejo	-	-	-

Kecamatan	Jumlah Sekolah SMA (Negeri)	Jumlah Sekolah SMA (Swasta)	Jumlah Sekolah SMA (Negeri+Swasta)
Jepon	1	-	1
Kota Blora	2	2	4
Banjarejo	-	-	-
Tunjungan	1	1	2
Japah	-	-	-
Ngawen	1	1	2
Kunduran	-	-	-
Todanan	-	1	1
Blora	8	16	24

Sumber : BPS Kab. Blora (2024)

Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan peserta didik menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Tabel di atas adalah data sekolah menengah (SMA) atas tahun 2023 di tiap kecamatan Kabupaten Blora. Berdasarkan tabel 2.6 terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis secara kritis:

- 1) Ketimpangan Jumlah SMA di Setiap Kecamatan Dari total 16 kecamatan di Kabupaten Blora, terdapat beberapa kecamatan yang tidak memiliki SMA sama sekali, seperti Sambong, Jiken, Bogorejo, Banjarejo, Japah, dan Kunduran. Hal ini dapat menjadi kendala bagi siswa di kecamatan tersebut karena harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengakses pendidikan di tingkat SMA.
- 2) Jumlah SMA Negeri yang Sangat Terbatas Dari total 24 SMA di Kabupaten Blora, hanya 8 sekolah yang berstatus negeri, sementara 16 lainnya adalah sekolah swasta. Ini berarti hanya sekitar 33,3% dari total SMA yang dikelola oleh pemerintah, sedangkan mayoritas

lainnya bergantung pada inisiatif swasta. Hal ini dapat berdampak pada keterjangkauan biaya pendidikan, karena sekolah swasta umumnya memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri.

- 3) Kecamatan dengan Konsentrasi SMA yang Lebih Banyak
Kecamatan Cepu memiliki jumlah SMA terbanyak, yaitu 7 sekolah (2 negeri dan 5 swasta), diikuti oleh Kecamatan Randublatung dengan 4 sekolah (1 negeri dan 3 swasta) serta Kota Blora dengan 4 sekolah (2 negeri dan 2 swasta). Kecamatan-kecamatan ini merupakan daerah yang lebih berkembang dibandingkan kecamatan lainnya, yang kemungkinan memiliki lebih banyak penduduk dan akses pendidikan yang lebih baik.
- 4) Keterbatasan Akses Pendidikan bagi Siswa dari Kecamatan Terpencil
Banyak kecamatan yang hanya memiliki satu SMA swasta atau bahkan tidak memiliki SMA sama sekali. Hal ini dapat menjadi kendala bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, terutama jika mereka tidak memiliki sarana transportasi yang memadai untuk bersekolah di kecamatan lain.

2.5 Laporan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Kabupaten Blora 2023

Good and clean governance menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pesatnya kemajuan teknologi, pemerintah diharapkan semakin responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa cakupan layanan publik meliputi berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, lingkungan hidup, komunikasi, serta jaminan sosial (Laporan SPM Kab Blora 2023, 2024).

Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan yang berkualitas melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sementara layanan kesehatan yang optimal memastikan kesejahteraan masyarakat. Kedua sektor ini juga saling mendukung, karena anak-anak yang sehat memiliki kesiapan lebih baik dalam belajar, sedangkan pendidikan yang baik meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya (Laporan SPM Kab Blora 2023, 2024).

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan SPM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pelayanan dasar merupakan prioritas utama. Perencanaan dan penganggaran daerah juga difokuskan untuk mendukung pencapaian SPM. Keberhasilan penerapan SPM menjadi indikator kinerja pemerintah daerah, di mana pencapaian kategori Tuntas Paripurna menunjukkan bahwa pelayanan dasar terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, implementasi SPM perlu ditingkatkan sebagai langkah strategis dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Laporan SPM Kab Blora 2023, 2024).

2.5.1 Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk sektor pendidikan. Kerangka hukum yang mendasari penerapan SPM memberikan arahan bagi pemerintah dalam menetapkan standar kualitas layanan yang harus dipenuhi. Subbab ini akan menguraikan berbagai regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan SPM, yang bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Blora Tahun 2023 meliputi berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah dan peraturan bupati, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
- 16) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021- 2026.
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
- 18) Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023.

2.5.2 Kebijakan Umum Penerapan SPM berdasarkan RPJMD

Visi kepala daerah Kabupaten Blora, yaitu “*Sesarengan Mbangun Blora Unggul dan Berdaya Saing*”, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora, menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Visi ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan melalui sinergi berbagai pihak dengan mengoptimalkan sumber

daya yang tersedia. Pelaksanaan SPM ini melibatkan dukungan aktif dari masyarakat, pemangku kepentingan, serta sektor swasta guna memastikan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Blora. (Laporan SPM Kab Blora 2023, 2024). Adapun komitmen daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM terutama dalam bidang pendidikan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 6 Komitmen Daerah Dalam Penerapan Dan Pencapaian SPM
Terutama Dalam Bidang Pendidikan**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
A. Urusan Pendidikan						
1	Misi ke 1 Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APS SD	93,25
					Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik	63
					APS SMP	74,25
					Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik	60
					APK PAUD	86
					Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik	68
					APS Kesetaraan	95

Sumber : SPM Kab Blora 2023

Tabel menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Program yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, yang diukur melalui beberapa indikator utama. Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam program ini mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk berbagai jenjang pendidikan, serta persentase guru bersertifikat pendidik di tingkat SD, SMP, dan PAUD. Target capaian yang ditetapkan, seperti APS SD sebesar 93,25% dan APS SMP sebesar 74,25%, mencerminkan tingkat keterlibatan anak usia sekolah dalam sistem pendidikan formal. Selain itu, persentase guru

bersertifikat pendidik, seperti 63% untuk SD, 60% untuk SMP, dan 68% untuk PAUD, menunjukkan upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Blora.

2.5.3 Arah kebijakan umum anggaran

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2023, fokus utama kebijakan pembangunan adalah “Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan” (Laporan SPM Kab Blora 2023, 2024). Kebijakan ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
- 2) Mewujudkan pemerataan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
- 3) Memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, progresif, bersih, dan akuntabel, serta memperkuat tata kelola pemerintahan.
- 5) Menjaga stabilitas wilayah dan harmoni sosial di masyarakat.

Dari 5 arah kebijakan di atas, uraian terkait penerapan SPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7 Prioritas Kab Blora Dalam Bidang Pendidikan

Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Utama pada Renstra OPD	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan dalam RPJMD
1. Urusan Pendidikan			
Peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin	APS SD	Menjamin pemenuhan SPM Pendidikan Dasar	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
	APS SMP		
	Persentase Guru SD Bersertifikat Pendidik		
	Persentase Guru SMP Bersertifikat Pendidik		
	APS Kesetaraan	Menjamin pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	
	APK PAUD	Menjamin pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini	
	Persentase Guru PAUD Bersertifikat Pendidik		

Sumber : Laporan SPM Kab. Blora 2023

Tabel 2.7 menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Blora. Prioritas utama dalam sektor pendidikan adalah peningkatan kualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin. Indikator kinerja utama dalam perencanaan strategis OPD mencakup Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP, APS Kesenjangan, serta Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian, yang ditunjukkan dengan persentase guru bersertifikat pendidik di SD, SMP, dan PAUD. Strategi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) difokuskan pada pemenuhan akses dan kualitas pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan anak usia dini. Dalam RPJMD, arah kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, sehingga masyarakat dapat mengakses pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.6 Kondisi Pendidikan Kabupaten Blora Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2023

Pada tahun 2023, Kabupaten Blora mencatat indeks pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam kategori Tuntas Muda dengan skor 67,61. Indeks ini mengukur berbagai aspek pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah (APS) pada rentang usia 5-6 tahun, 7-15 tahun, serta 7-18 tahun kesetaraan. Selain itu, indikator lain yang dinilai mencakup kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, kondisi keamanan di lingkungan sekolah, keberagaman, inklusivitas pendidikan, proporsi guru PAUD yang telah memiliki kualifikasi minimal S1/D4, serta jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B. (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, dalam blorakab.go.id).

2.6.1 Capaian Angka Partisipasi Sekolah

Data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Blora tahun 2023 menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan yang cukup tinggi di berbagai kelompok usia (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, dalam blorakab.go.id). APS Usia 5-6 Tahun (95,08%) Sebagian besar anak usia dini telah memperoleh akses ke pendidikan pra-sekolah atau PAUD. Namun, masih terdapat sekitar 4,92% anak yang belum berpartisipasi, kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua, atau terbatasnya fasilitas PAUD di beberapa wilayah. APS Usia 7-12 Tahun (99,9%) Tingkat partisipasi pendidikan dasar ini hampir mencapai universal, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia SD di Kabupaten Blora telah

bersekolah. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan wajib belajar serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar. APS Usia 13-15 Tahun (96,63%) Partisipasi sekolah di jenjang SMP juga cukup tinggi, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tingkat SD. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan penurunan ini termasuk kendala ekonomi, jarak sekolah yang jauh, atau faktor sosial lainnya. APS Usia 7-15 Tahun (98,81%) Rata-rata partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama di Kabupaten Blora sudah sangat baik, menunjukkan bahwa mayoritas anak dalam rentang usia ini tetap berada dalam sistem pendidikan formal. APS Kesetaraan Usia 7-18 Tahun (4,3%) Tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan masih sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil anak dan remaja yang memilih jalur pendidikan nonformal seperti Paket A, B, atau C, yang bisa jadi disebabkan oleh preferensi terhadap pendidikan formal atau minimnya sosialisasi mengenai pendidikan kesetaraan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, dalam blorakab.go.id).

2.6.2 Literasi dan Numerasi capaian

Capaian kemampuan literasi pada SD Umum (Negeri dan Swasta) tahun 2023 yaitu sebesar 70,44. Berbeda dengan capaian SD Umum, capaian untuk SD Keagamaan tahun 2023 yaitu sebesar 56,14. Untuk kemampuan numerasi pada SD Umum tahun 2023 sebesar 54,81. capaian numerasi pada SD Keagamaan tahun 2023 yaitu sebesar 36,58. Capaian kemampuan literasi pada tingkat SMP Umum (Negeri dan Swasta) tahun

2023 sebesar 74,76. Berbeda dengan capaian SMP Umum, capaian untuk SMP Keagamaan tahun 2023 yaitu sebesar 56,25. Untuk kemampuan numerasi pada peningkatan SMP Umum dari tahun 2023 sebesar 52,79. Sedangkan, SMP Keagamaan tahun 2023 yaitu sebesar 34,88.

2.6.3 Capaian Iklim Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusifitas

Pada jenjang SD Umum, capaian iklim keamanan tahun 2023 yaitu sebesar 69,73; kemampuan iklim kebinekaannya tahun 2023 sebesar 69,46; dan capaian iklim inklusifitasnya tahun 2023 yaitu sebesar 56,64. Untuk SD Keagamaan, capaian iklim keamanan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 62,13; capaian iklim kebinekaan tahun 2023 sebesar 64,88; dan pencapaian iklim inklusifitasnya tahun 2023 yaitu sebesar 52,79. Pada SMP Umum, capaian iklim keamanan sekolah capaian tahun 2023 yang sebesar 66,78; kemampuan iklim kebinekaan tahun 2023 sebesar 67,69; capaian iklim inklusifitas tahun 2023 yaitu sebesar 55,23. Sedangkan untuk SMP Keagamaan capaian iklim keamanan tahun 2023 sebesar 62,69; kemampuan iklim kebinekaan tahun 2023 sebesar 63,43; pencapaian iklim inklusifitas tahun 2023 sebesar 52,98.